



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS TENAGA KERJA**

**PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR :        /        /2018**

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang        : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2018 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2019;

b. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2019 merupakan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

Mengingat        : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4421 );
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dearah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

## Pasal 1

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2019 yang memuat Rencana Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulasi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

## Pasal 2

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD;
- 3.2. Program dan Kegiatan.

### BAB IV PENUTUP

### Pasal 3

Isi, Uraian dan perincian Rencana Kerja ( Renja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal Agustus 2018

KEPALA TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MU'MINUN, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196805261994031005

Lampiran :Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Pemalang  
Nomor :  
Tanggal :  
\_\_\_\_\_

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan sebagai proses awal dari tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan mensyaratkan adanya perumusan alternatif keputusan yang cepat, tepat dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi proses yang dibutuhkan karena keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan sangat bergantung kepada kualitas konsep perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian sejauhmana ketersediaan sumber dana dan sumber daya aparatur dapat digunakan dalam mendukung program dan kegiatan dapat diprediksikan melalui asumsi yang mendasari konsepsi perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

**Rencana Kerja ( Renja ) SKPD** adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 273 ayat (2),(3),(4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), rencana kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rencana Kerja ( Renja ) merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja OPD merupakan salah satu tahapan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan konsepsi perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Renstra OPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah .

Tahun 2019 merupakan tahun keempat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Oleh karena hal tersebut, dasar penyusunan Renja ini adalah visi dan misi Bupati Pematang Siantar. Adapun Visi Bupati Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Pematang Hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan Sejahtera.”***



Sedangkan Misi Bupati Pemalang antara lain :

- a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati;
- f. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
- g. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat-

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam menyusun program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Renja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk:

1. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

2. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur selama 1 tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam 1 tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan PD;
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja;

#### 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

##### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### BAB IV PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017, capaian Rencana Kerja tahun 2018 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja, pada urusan wajib non pelayanan dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Ketrasmigrasian. Realisasi program/kegiatan tahun 2017 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang sebagai dokumen perencanaan disusun selama 1 tahun anggaran merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada akhir tahun anggaran, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Dari hasil evaluasi rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021, bahwa pada Tahun 2017, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mendapat alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.985.927.000,- yang terdiri dari 2 urusan, 10 Program dan 63 kegiatan. Pada tahun 2017 dari jumlah anggaran yang ada telah terserap sebesar Rp.5.773.323.389,- (96,45%) Sisa anggaran sebesar Rp. 212.603.611,- (3,55%) berupa **sisa pengadaan barang jasa dan efisiensi anggaran**. Prosentase capaian yang mencapai 96,45 % tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja dan urusan pilihan ketrasmigrasian telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

##### 1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

No.	Program/Kegiatan	% realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2017	
		K	Rp.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	93,58

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	93,41
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	99,40
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99,91
5.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100	99,61
6.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	97,87
7.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100	97,96
8.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100	99,90

## 2. Urusan Pilihan Ketransmigrasian

No.	Program/Kegiatan	% realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2017	
		K	Rp.
1.	Program Pengembangan wilayah transmigrasi	100	91,53
2.	Program Transmigrasi umum	100	99,19

**Tabel 1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018 (Triwulan II )  
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Urusan Wajib										
	Ketenagakerjaan										
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan								
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim dengan baik dengan jumlah surat masuk (surat/notdin)	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00	39,44%	100,00
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik (3 jenis=12 bulan)	100	100	100,00	100	100	100,00	33,93%	100,00
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	100	100	100,00	100	100	100,00	34,23%	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dipelihara (60 peralatan = 12 bulan)								
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas . Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara (48=12 bulan)	100	100	100,00	100	100	100,00	42,35%	100,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhi (3 orang=12 bulan)	100	100	100,00	100	100	100,00	8,27%	100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100	100	100,00	100	100	100,00	38,87%	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia	100	100	100,00	100	100	100,00	45,59%	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	100	100	100,00	100	100	100,00	44,17%	100,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	100	100,00	100	100	100,00	39,38%	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	100	100	100,00	100	100	100,00	25,82%	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	100	100	100,00	100	100	100,00	47,24%	100,00
	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	jumlah rapat dan konsultasi yang dapat dihadiri	100	100	100,00	100	100	100,00	56,25%	100,00
	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi	100	100	100,00	100	100	100,00	44,08%	100,00
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>meningkatkan sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan</b>							0%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang tersedia	100		100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	100		100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur yang tersedia	100		100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	100		100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	jumlah komputer dan perlengkapannya yang tersedia	100		100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang terpelihara	100	100	100,00	100	100	100,00	21,39%	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	100	100	100,00	100	100	100,00	56,84%	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah prasarana BLK yang dipelihara (3 peralatan)	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang	100		100,00	100	100	100,00	0%	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		membutuhkan pemeliharaan								
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kerja	Jumlah prasarana BLK yang tersedia	100	100	100,00	100	100	100,00	82,94%	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan bersejarah	jumlah bangunan bersejarah yang dipelihara	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung induk transit, gudang bencana, BLK yang direhab	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>								
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	jumlah peserta sosialisasi	100		100,00	100	100	100,00	85,97%	100,00
	Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah bimtek yang diikuti (12 kali)	100	100	100,00	100	100	100,00	99,20%	100,00
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan</b>								100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Laporan kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	jumlah laporan yang dihasilkan	100	100	100,00	100	100	100,00	66,30%	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan benar	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan yang dihasilkan	100	100	100,00	100	100	100,00	38,19%	100,00
	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>								
	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Tersedianya database perencanaan	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan	100	100	100,00	100	100	100,00	62,15%	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan penganggaran SKPD								
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>								100,00
	Penyusunan Data base Tenaga Kerja Daerah	tersedianya database tenaga kerja daerah	100		100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kelembagaan dan Instruktur BLK	jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK (35 orang)	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Jumlah bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja yang tersedia	100		100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Kerja	jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan kerja (495 orang)	100	100	100,00	100	100	100,00	97,37%	100,00
	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah prasarana BLK yang dibutuhkan (111 buah)	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialissi pengukuran produktivitas (20 orang)	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang dilakukan penilaian kinerja	100	100	100,00	100	100	100,00	100%	100,00
	Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menyusun profil kelembagaan (35 LPKS)	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Bimbingan program pemagangan ke luar negeri	Jumlah peserta pemagangan ke luar negeri yang mengikuti bimbingan (40 orang)	100	100	100,00	100	100	100,00	97,70%	100,00
	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>meningkatnya kesempatan kerja</b>								
	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	jumlah buku penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan (222 buku)	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersebar (35 jenis)	100	100	100,00	100	100	100,00	17,94%	100,00
	Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai	Jumlah siswa kelas XII yang mendapat penyuluhan dan bimbingan tes leader	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pemberian Fasilitas dan Mendorong sistem pandanaan pelatihan berbasis masyarakat	terlaksananya jumlah orang yang mendapat bantuan praktek, sarana usaha dan pelatihan	100	100	100,00	100	100	100,00	99,78	100,00
	Penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah	Tersusunnya pengembangan rencana tenaga kerja daerah	100		100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pelaksanaan Kegiatan Padat Kerja darurat	terwujudnya kesempatan kerja yang tersedia	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pendampingan, Pengelolaan unit Bursa Kerja Khusus	Prosentase tercapainya bimtek Bursa Kerja khusus (BKK)	100	100	100,00	100	100	100,00	100%	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	100	100	100,00	100	100	100,00	24,22%	100,00
	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b>								
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan 4 kasus	100	100	100,00	100	100	100,00	49,87%	100,00
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	jumlah permasalahan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 2 kasus	100	100	100,00	100	100	100,00	20,70%	100,00
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Sosialisasi UMK, Jamsostek, Norma Kerja dan Penempatan TKI ke Luar Negeri	100	100	100,00	100	100	100,00	32,61%	100,00
	Peningkatan Pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan	Perusahaan dan tenaga kerja yang dilakukan pemeriksaan	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	kerja (K3) / (UMK/THR)									
	Pemberdayaan LKS Tripartit	Jumlah survey KHL dan rapat LKS Tripartit	100	100	100,00	100	100	100,00	58,99%	100,00
	Pembinaan dan Pemantauan kinerja Organisasi	Jumlah SP/SB yang tercatat dibandingkan dengan jumlah seluruh 14 SP/SB	100	100	100,00	100	100	100,00	67,98%	100,00
	Pembinaan pembuatan dan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan	Prosentase jumlah perusahaan yang dibina untuk pembuaan dan pembentukan sarana HI (PP,PKB,SP,kopkar dan LK Bipartit) ( 6 PP/PKB/LKS)	100	100	100,00	100	100	100,00	47,59%	100,00
	Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing yang dibina dan didata (22perusahaan)	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengujian lingkungan kerja diperusahaan	jumlah perusahaan yang telah dilakukan pengujian lingkungan kerja	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	Pemberdayaan Dewan Pengupahan	Prosentase jumlah rapat komponen survei, pengolahan data, penetapan KHL dan UMK	100	100	100,00	100	100	100,00	39,48%	100,00
	Fasilitasi Pengujian Peralatan di perusahaan	jumlah pengujian peralatan keselamatan kerja	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00
	<b>Program Pengembangan wilayah transmigrasi</b>	<b>Berkembangnya wilayah transmigrasi</b>							0%	
	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan trans	Jumlah MoU pertahun	100	100	100,00	100	100	100,00	52,59%	100,00
	Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah calon transmigran yang dikirim ke lokasi	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018 bln Mei	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Transmigrasi regional</b>	<b>berkembangnya wilayah transmigrasi</b>							0%	
	Pelatihan Transmigrasi Regional	Jumlah calon transmigran terdidik	100	100	100,00	100	100	100,00	99,72%	100,00
	Penyiapan database calon Transmigran	Jumlah animo calon transmigran yang berminat berangkat transmigrasi 14 kecamatan	100	100	100,00	100	100	100,00	14,47%	100,00
	Seleksi Calon Transmigran	Jumlah calon transmigran yang di seleksi	100	100	100,00	100	100	100,00	13,95%	100,00
	Pembinaan transmigran pasca penempatan	jumlah kesiapan lokasi dan jumlah transmigran yang terfasilitasi	100	100	100,00	100	100	100,00	100%	100,00
	Pembinaan transmigran pra penempatan	Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi	100	100	100,00	100	100	100,00	0%	100,00

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum terhadap pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahunan (tahun 2011-2015) dapat kami sajikan sebagai berikut:

### ➤ Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian dan keterpaduan dalam penanganan. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir :

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah angkatan kerja	833.429	928.743	960.617	979.777	1.090.976
2.	Jumlah pengangguran	204.585	216.712	234.736	240.069	274.448
3.	Jumlah pencari kerja	9.124	10.801	13.083	12.341	13.075
4.	Jumlah bursa kerja	27	34	40	46	52

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan mulai tahun 2011 sebesar 833.429 tahun 2012 sebesar 928.743 tahun 2013 sebesar 960.617 tahun 2014 sebesar 1.090.976 tahun 2015. Sementara itu jumlah pengangguran selama kurun waktu 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan. Jumlah pencari kerja selama kurun waktu tahun 2011 sebesar 204.585, tahun 2012 sebesar 216.712 tahun 2013 sebesar 234.736, tahun 2014 sebesar 240.069, tahun 2015 sebesar 274.448 sedangkan jumlah bursa tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2011-2016 mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 27 bursa, tahun 2012 sebanyak 34, tahun 2013 sebanyak 40, tahun 2014 sebanyak 46, tahun 2015 sebanyak 52 bursa kerja.

Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran terus dilakukan antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, penyelenggaraan bursa tenaga kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja. Sedangkan upaya peningkatan dan

produktifitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan.

Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang ada 2 jenis pelatihan yaitu :

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi;
2. Pelatihan berbasis masyarakat.

No.	Jenis Pelatihan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Berbasis Kompetensi	50	125	250	325	545
2.	berbasis masyarakat	100	120	140	220	260
3.	Jumlah LPKS	35	35	35	36	39

Dilihat dari jumlah peserta pelatihan yang telah dilaksanakan di Dinsosnakertrans Kabupaten Pemalang untuk pelatihan berbasis masyarakat, tahun 2011 diikuti oleh 100 peserta, tahun 2012 sebanyak 120 peserta, tahun 2013 sebanyak 140 peserta, tahun 2014 sebanyak 220 peserta, tahun 2015 sebanyak 260 peserta.

Untuk pelatihan berbasis kompetensi, tahun 2011 diikuti oleh 50 peserta, tahun 2012 diikuti oleh 125 peserta, tahun 2013 diikuti oleh 250 peserta, tahun 2014 diikuti oleh 325 peserta, tahun 2015 diikuti oleh 545 peserta. Sedangkan untuk jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sampai dengan kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan.

Penempatan tenaga kerja Antar Kerja antar daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal dan Antar Kerja Antar Negara Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2011-2015 dapat disajikan dalam tabel berikut :

No.	Jenis Data	2011	2012	2013	2014	2015
1.	AKAD					
	Laki-laki	565	295	1912	454	3948
	Perempuan	990	549	1.212	536	3791
	Jumlah	<b>1555</b>	<b>844</b>	<b>3124</b>	<b>990</b>	<b>7739</b>
2.	AKL					
	Laki-laki	18	600	560	1.078	74
	Perempuan	375	1.055	441	1.533	391
	Jumlah	<b>393</b>	<b>1655</b>	<b>1001</b>	<b>2611</b>	<b>465</b>
3.	AKAN					
	Laki-laki	52	236	115	121	392
	Perempuan	21	26	200	65	108
		<b>73</b>	<b>262</b>	<b>315</b>	<b>186</b>	<b>500</b>

4.	Tenaga kerja di luar negeri (penempatan TKI)					
	Tenaga Kerja Wanita	1	34	42	84	62
	Tenaga Kerja Pria	3	37	1	193	155
	Jumlah	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>277</b>	<b>217</b>

Untuk penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) selama kurun waktu tahun 2011-2015, jumlah tenaga kerja sebanyak 7.739 orang, komposisi jumlah tenaga kerja perempuan dan laki-laki-laki berimbang. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja antar kerja Lokal (AKL) di Kabupaten Pemalang menunjukkan tenaga kerja AKL sebagian besar adalah perempuan, mencapai puncaknya pada tahun 2014 sebesar 2.611 orang dan menurun pada tahun 2015 sebesar 465 orang. Sedang untuk tenaga kerja antar kerja antar negara (AKAN) selama kurun waktu tahun 2011-2015 perkembangannya fluktuatif dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 sebanyak 500 orang.

Dalam rangka meningkatkan kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui peningkatan syarat kerja dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan), perlu meningkatkan sarana prasarana hubungan industrial (Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerjasama Bipartit, Tripartit, Dewan Pengupahan, meningkatkan perlindungan upah (UMK), meningkatkan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan melalui pemeriksaan perusahaan komprehensif, pengujian peralatan kerja di perusahaan.

Sedangkan untuk pelayanan hubungan industrial di Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu tahun 2011-2015 dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Data	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PHK	8	4	7	5	6
2.	Jumlah TK PHK	148	43	147	46	197
3.	Kasus perselisihan tenaga kerja	4	4	4	4	4

4.	Kasus kecelakaan tenaga kerja	40	30	26	24	15
5.	Rata-rata kebutuhan hidup minimum	788.064,60	830.905,09	940.734,00	1.104.244,27	1.170.000,00
6.	Rata-rata upah minimum regional	725.000	793.000	908.000	1.066.000	1.193.400
7.	Rasio Upah Minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak	92	95,44	96,53	96,54	102

Untuk Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam kurun waktu tahun 2011-2015 bersifat fluktuatif, tahun 2011, perusahaan yang melakukan PHK sebanyak 8 perusahaan, tahun 2012 sebanyak 7 perusahaan, tahun 2013 sebanyak 5 perusahaan, tahun 2015 sebanyak 6 perusahaan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada tahun 2011 sebanyak 148 orang, tahun 2012 sebanyak 48 orang, tahun 2013 sebanyak 147 orang, tahun 2014 sebanyak 46 orang dan tahun 2015 sebanyak 197 orang. Untuk kasus perselisihan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2011-2015 sebanyak 4 kasus. Sedangkan untuk kasus kecelakaan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami penurunan, tahun 2011 sebanyak 40 kasus kecelakaan kerja, tahun 2012 sebanyak 30 kasus, tahun 2013 sebanyak 26 kasus, tahun 2014 sebanyak 24 kasus dan tahun 2015 menurun menjadi 15 kasus.

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Pematang Selayar selama kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami kenaikan, tahun 2011 sebesar Rp. 788.064,60 tahun 2012 sebesar Rp. 830.905,09, tahun 2013 sebesar Rp. 940.734,-, tahun 2014 sebesar Rp. 1.104.244,27 dan tahun 2015 sebesar Rp. 1.170.000,-. Sedangkan untuk rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pematang Selayar selama kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami kenaikan, untuk tahun 2011 sebesar Rp. 725.000,-, tahun 2012 sebesar Rp. 793.000,- tahun 2013 sebesar Rp. 908.000,- tahun 2014 sebesar Rp. 1.066.000, tahun 2015 sebesar Rp. 1.193.400,-. Rasio UMK terhadap KHL,

untuk tahun 2011 sebesar 92%, tahun 2012 sebesar Rp. 95,44%, tahun 2013 sebesar Rp. 96,52%, tahun 2014 sebesar 96,54% tahun 2015 sebesar 102%.

➤ **Bidang Transmigrasi**

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.

NO	Jenis Kegiatan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah calon transmigran (KK)	KK	137	108	141	160	160
2.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	KK	30	30	20	8	18

Jumlah calon transmigrasi yang terdaftar di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2011-2015, mengalami peningkatan tahun 2011 jumlah calon transmigran sebanyak 137 KK dan tahun 2015 jumlah calon transmigran sebanyak 160 KK, sedangkan jumlah transmigran yang diberangkatkan sesuai dengan target yang ditetapkan mengalami penurunan disebabkan penentuan lokasi dan kuota transmigran dari pemerintah pusat.

Sedangkan untuk capaian/realisasi indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

**Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2011-2015**

	Ketenagakerjaan	Targe t 2015	Reali sasi 2015	Targe t 2016	Reali sasi 2016	Targe t 2016	Reali sasi 2016	Targe t 2016	Realis asi 2016	Targ et 2016	Reali sasi 2016
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	55	70,25	56,27	57,4	58	50,33	60	89,9	61	94,62
2.	Pencari kerja yang ditempatkan	91	91,5	92	92,3	93	93,53	94	94,62	95	95,2
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,8	6	7,6	7,3	7,4	5,66	7,2	5,41	7	4,57



4.	Jumlah bursa tenaga kerja	38	44	39	49	40	40	41	58	42	42
5.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	92,2	92,4	92,4	93,2	92,6	92,33	92,8	93,47	93	74,71
6.	Rasio ketergantungan	43,9	43,37	43,8	35,38	43,7	36,14	43,6	41,38	43,5	28,37

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk tingkat partisipasi angkatan kerja untuk kurun waktu tahun 2011-2016, mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Pematang Jaya cukup besar. Untuk indikator Pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami kenaikan dari jumlah pencari kerja yang mendaftar, jumlah yang ditempatkan sampai tahun 2015 mencapai 95 %. Ini menunjukkan perkembangan yang positif dimana pencari kerja yang ditempatkan makin bertambah tiap tahunnya.

Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka (%), diartikan merupakan penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari jumlah angkatan kerja yang ada. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami penurunan disebabkan banyak pencari kerja yang sebelumnya menganggur diterima bekerja.

Untuk peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja sampai tahun 2015 mencapai 91%. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pematang Jaya melalui Balai Latihan Kerja (BLK) menyelenggarakan pelatihan dan ketrampilan bagi pencari kerja. Pelatihan yang ada di BLK antarlain pelatihan menjahit, otomotif dan las. Peran BLK dalam mencetak lulusan yang memiliki daya saing di pasar tenaga kerja cukup signifikan. Untuk capaian indikator Rasio Penduduk (angkatan kerja) yang bekerja selama 5 tahun terakhir menunjukkan arah positif.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka menekan angka pengangguran adalah dengan melaksanakan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kelembagaan dan Instruktur BLK, Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Kerja, Pengadaan sarana dan

prasarana BLK, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja, Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta, dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai, Pemberian Fasilitas dan Mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, Pelaksanaan Kegiatan Padat Kerja darurat, Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.

### Evaluasi Kinerja Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Tahun 2011-2015

1.	Keselamatan dan perlindungan	53	100	54,86	100	56	55,1	58	60,96	60	66,07
2.	Pesentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)	65	100	70	100	75	75	80	80	85	100
3.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,1	0,1	0,97	0,1	0,91	0,37	0,87	0,12	0,82	0,492
4.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) (%)	41,0	0	43	0	45	66	47	67,46	49	56,28
5.	Rasio UMK terhadap KHL (%)	86,25	86,25	90,35	86,25	95	96,54	98,5	96,54	100	102

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tahun 2011-2015 yang terdiri dari lima indikator mengalami capaian pelayanan yang baik setiap tahunnya. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik bagi pekerjaannya, perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Dari jumlah perusahaan pada tahun 2015 yang ada di Kabupaten Pematang sebanyak 392 perusahaan yang telah menerapkan K3 sebanyak 259. Indikator prosentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan menunjukkan kasus perselisihan dibanding semua kasus perselisihan tenaga kerja yang terjadi pada tahun tertentu. Jumlah kasus perselisihan yang terselesaikan sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa semua kasus perselisihan yang terjadi dan dilaporkan dapat

diselesaikan dengan baik. Untuk indikator angka sengketa pengusaha pekerja pertahun menunjukkan penurunan (relatif kecil). Penyelesaian sengketa atau perselisihan antara pengusaha dan pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan untuk Rasio Upah Minimal Kabupaten (UMK) terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari tahun 2011-2016 mengalami kenaikan. Tahun 2015 jumlah UMK Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 1.193.400,- sedangkan jumlah KHL sebesar Rp. 1.170.000,-.

### Evaluasi Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2011-2015

	<b>Ketransmigrasian</b>											
1.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	30	30	30	30	30	20	30	8	30	18	
2.	Jumlah Calon transmigran (KK)	137	137	142	108	147	141	155	160	160	160	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan urusan transmigrasi dengan capaian 2 indikator kinerja urusan transmigrasi selama kurun waktu tahun 2011-2015 hanya tercapai 1 indikator kinerja sedangkan indikator jumlah calon transmigrasi yang diberangkatkan tidak tercapai disebabkan penetapan kuota dari pusat.

Jumlah calon transmigrasi yang terdaftar di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2011-2015, mengalami peningkatan tahun 2011 jumlah calon transmigran sebanyak 137 KK dan tahun 2015 jumlah calon transmigran sebanyak 160 KK, sedangkan jumlah transmigran yang diberangkatkan sesuai dengan target yang ditetapkan mengalami penurunan disebabkan penentuan lokasi dan kuota transmigran dari pemerintah pusat sehingga target penempatan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh daerah tidak tercapai.

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi

Dalam bidang Ketenagakerjaan isu penting permasalahan yang ada antara lain :

1. Masih tingginya angka pengangguran;
2. Masih kurangnya kesempatan kerja/jumlah lapangan kerja terbatas;
3. Masih rendahnya kualitas SDM TKI;
4. Dokumen pemberangkatan TKI tidak lengkap;
5. Aturan khusus Anak Buah Kapal/pelaut belum ada;
6. Kurangnya jumlah tenaga pelatihan;
7. Kurangnya jumlah dan kualitas instruktur sesuai dengan tuntutan kualifikasi assessor;
8. Kurangnya peralatan dan gedung untuk tempat uji kompetensi (TUK);
9. Kurangnya Tenaga penguji;
10. Kurang aktifnya tenaga mediator
11. Untuk perusahaan marginal mobilitas karyawan keluar masuk cukup tinggi;
12. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja
13. Belum optimalnya penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan

Sedangkan permasalahan bidang **transmigrasi** antara lain :

1. Adanya pembatasan/kuota transmigran (ditentukan oleh Pusat);
2. Kurang optimalnya penyediaan lokasi penempatan dengan kesiapan daerah penempatan yang benar-benar sesuai kriteria;
3. Belum optimalnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor pendukung urusan transmigrasi;
4. Penyelesaian naskah MOU belum dikoordinir oleh Dinakertrans Propinsi Jawa Tengah.

Sesuai kondisi permasalahan diatas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis didukung dengan pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu-isu strategis maka perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana tindaklanjut berupa program dan kegiatan yang nyata yang didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan disusunlah program-program sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Peningkatan kesempatan kerja.
3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
4. Pengembangan wilayah transmigrasi
5. Transmigrasi umum.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan kinerja dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Dengan adanya RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, diharapkan adanya konsistensi antar semua dokumen perencanaan.

Secara umum program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah tertampung dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk usulan kegiatan yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan hanya tidak semua program dan kegiatan dapat terdanai sesuai dengan usulan yang ada dalam rancangan awal RKPD.

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016-2021, ada beberapa program prioritas dari Kepala Daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program tersebut merupakan program prioritas yang sifatnya sangat strategis, dan untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang program prioritasnya adalah Pengembangan Balai Latihan Kerja . Untuk Review Rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel 2

#### 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam proses pembangunan daerah adalah melalui Forum SKPD . Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Dalam forum ini **dilakukan** penyelarasan usulan antara hasil-hasil musrenbang Kecamatan dengan rencana kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi semua persoalan di semua sektor. Musrenbang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah pembangunan daerah terdiri dari prioritas I dan 2, Prioritas 1 merupakan kegiatan hasil musrenbang yang jelas terdanai. Matriks Kegiatan Hasil Musrenbang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 3

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra (Rencana Strategis) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Pemalang.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2019 diarahkan pada;

- Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
- Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
- Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif
- Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
- Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum

Tahun 2019 di Kementerian ketenagakerjaan mengagendakan sebagai tahun pembangunan sumber daya manusia sehingga pada tahun tersebut programnya adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, sertifikasi profesi serta membangun kewirausahaan di kalangan anak muda.

Adapun tema dan prioritas pembangunan Provinsi Jateng Tahun 2019 adalah Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek. Sedangkan Sasaran pembangunannya adalah :

- Pertumbuhan ekonomi : 5,2 – 5,6 %
- Inflasi :  $4 \pm 1$  %
- Indek Pembangunan Manusia : 71,60
- Kemiskinan : 11,01 – 12,01 %
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,33 – 4,43 %

Untuk Kabupaten Pemalang di Tahun 2019 mempunyai tujuan pembangunan yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berdaulat pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan.

Dari tujuan – tujuan tersebut dapat dicapai dengan sinergitas pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta masyarakat.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra PD ini berakhir. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk mencapai Misi yang ke 3 Bupati "*Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan dengan berbasis sumber daya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan penganggur*" yaitu dengan :

Tujuan : Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran

- Sasaran :
1. Menurunnya tingkat pengangguran
  1. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja
  2. Meningkatnya akreditasi dan perijinan lembaga pelatihan kerja.
  3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri
  4. Meningkatnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga

Kerja

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi  
 Sedang untuk misi 1 Bupati yaitu “*Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musawarah mufakat dan gotong royong*” adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah

No.	Permasalahan /Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan
I.	Bidang Tenaga Kerja			
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran	<b>Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>
			Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
			Meningkatnya akreditasi dan perijinan lembaga pelatihan kerja	Pengadaan sarana dan prasarana BLK
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
				Penyusunan Profil Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta
				<b>Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>
				Pendidikan dan pelatihan profesionalisme tenaga kerja
				Penyusunan database tenaga kerja daerah
				Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
				Bimbingan program pemagangan ke luar negeri
				<b>Peningkatan</b>



				<b>kesempatan kerja</b>
				Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri
				Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
				Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
				Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
				Penyiapan tenaga kerja siap pakai
				Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat
				Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus
			Meningkatnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	<b>Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b>
				Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
				Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
				Pengujian lingkungan kerja di perusahaan
				Fasilitasi pengujian peralatan di perusahaan
				Pemberdayaan LKS Tripartit
				Pemberdayaan dewan pengupahan
				Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian prselisihan hubungan industrial
				Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan

				jaminan sosial tenaga kerja
				Pembinaan dan pemantauan kinerja organisasi
				Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan
				Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi	<b>Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>
				Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
				Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
				<b>Transmigrasi Regional</b>
				Pelatihan Transmigrasi Regional
				Penyiapan database calon transmigran
				Seleksi calon transmigran
				Pembinaan transmigran pascapenempatan

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 yang diarahkan untuk mendukung pemanfaatan potensi ekonomi daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka program dan kegiatan prioritas daerah selain dijabarkan ke dalam pelaksanaan urusan pemerintah juga ditekankan pada upaya-upaya antara lain : Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin melalui:

- Peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan kemampuan melalui upaya pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pembangunan teknopark;

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu 1 (satu) tahun.

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ;

➤ Urusan Tenaga Kerja:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
  - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  - h. Penyediaan alat tulis kantor;
  - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - l. Penyediaan peralatan rumah tangga;
  - m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - n. Penyediaan bahan logistik kantor;
  - o. Penyediaan makanan dan minuman;
  - p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah;
  - q. Penyediaan Jasa Keamanan.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- a. Pembangunan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - d. Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - e. Pengadaan mebeleur;
  - f. Pengadaan komputer dan perlengkapannya;
  - g. Pengadaan alat-alat elektronik
  - h. Pengadaan lemari besi dan feling cabinet;
  - i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  - j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  - l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
  - m. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
  - n. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya;
  - o. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik;
  - p. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja;
  - q. Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling cabinet;
  - r. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
  - b. Pengadaan pakaian kerja lapangan
  - c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur;
- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
  - c. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
  - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
6. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
    - a. Penyusunan data base perencanaan SKPD;
    - b. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD.
7. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
    - a. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK;
    - b. Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja;
    - c. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja;
    - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
    - e. Pengadaan sarana dan prasarana BLK;
    - f. Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja;
    - g. Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta;
    - h. Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta;
8. Peningkatan Kesempatan Kerja;
    - a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja;
    - b. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
    - c. Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
    - d. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
    - e. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat;
    - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
    - g. Penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah
    - h. Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat;
    - i. Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus;
    - j. Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
    - k. Pendataan angkatan kerja
9. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
    - a. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja;
    - b. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- c. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - d. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
  - e. Pemberdayaan LKS Tripartit
  - f. Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi;
  - g. Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan;
  - h. Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan;
  - i. Pemberdayaan dewan pengupahan.
- Urusan Transmigrasi
- 1. Pengembangan wilayah transmigrasi;
    - a. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi;
    - b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM.
  - 2. Transmigrasi Umum.
    - a. Pelatihan transmigrasi regional;
    - b. Penyiapan data base calon transmigran;
    - c. Seleksi calon transmigran;
    - d. Pembinaan transmigran pasca penempatan;
    - e. Pembinaan Transmigran Pra Penempatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2019 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2019.

Renja (Rencana Kerja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih *indikatif* sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja 2019 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang 2019.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MU'MINUN, M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680526 199403 1 005

**Tabel 2**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019**  
**Kabupaten Pemalang**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja Kab. Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Tenaga Kerja				11.480.250.000	Dinas Tenaga Kerja				11.480.250.000	
	<u>Ketenagakerjaan</u>				10.805.250.000	<u>Ketenagakerjaan</u>				10.805.250.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	1.212.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	1.212.000.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat		jumlah surat terkirim selama 12 bulan	2.500 srt	83.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat		jumlah surat terkirim selama 12 bulan	2.500 srt	83.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		jumlah tagihan telepon,air dan listrik selama 12 bulan	3 jenis	200.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		jumlah tagihan telepon,air dan listrik selama 12 bulan	3 jenis	200.000.000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ada selama 12 bulan	60 perlt	25.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ada selama 12 bulan	60 perlt	25.000.000	



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah yang dipelihara dan berijin selama 12 bulan	48 unit	20.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah yang dipelihara dan berijin selama 12 bulan	48 unit	20.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan		jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	1 lap	30.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan		jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	1 lap	30.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor		jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	6 org, 1 paket	85.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor		jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	6 org, 1 paket	85.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama 12 bulan	5 jenis	15.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama 12 bulan	5 jenis	15.000.000
Penyediaan alat tulis kantor		jumlah alat kantor yang tersedia selama 12 bulan	12 bln	50.000.000	Penyediaan alat tulis kantor		jumlah alat kantor yang tersedia selama 12 bulan	12 bln	50.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan	10 spanduk	30.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan	10 spanduk	30.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jumlah komponen listrik yang tersedia selama 12 bulan	10 jenis	20.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jumlah komponen listrik yang tersedia selama 12 bulan	10 jenis	20.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	1 jenis	120.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	1 jenis	120.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga		jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bln	20.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga		jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bln	20.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 12 bulan	2900 eks	15.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 12 bulan	2900 eks	15.000.000	
Penyediaan bahan logistik kantor		jumlah bahan logistik yang tersedia selama 12 bulan	35 tabung	10.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor		jumlah bahan logistik yang tersedia selama 12 bulan	35 tabung	10.000.000	
Penyediaan makanan dan minuman		jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	3,000 dus	69.000.000	Penyediaan makanan dan minuman		jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	3,000 dus	69.000.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah		jumlah rapat dan konsultasi yang dapat dihadiri/diikuti	70 kali	300.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah		jumlah rapat dan konsultasi yang dapat dihadiri/diikuti	70 kali	300.000.000	
Penyediaan Jasa Keamanan		jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi tersedia selama 12 bulan	6 org	120.000.000	Penyediaan Jasa Keamanan		jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi tersedia selama 12 bulan	6 org	120.000.000	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.707.500.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.707.500.000</b>	
Pembangunan gedung kantor		Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	1.500.000.000	Pembangunan gedung kantor		Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	1.500.000.000	

Pengadaan kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	2 unit	60.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	2 unit	60.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	4 jenis	50.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	4 jenis	50.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor		jumlah peralatan gedung yang terpenuhi	0 jenis	-	Pengadaan peralatan gedung kantor		jumlah peralatan gedung yang terpenuhi	0 jenis	-
Pengadaan mebeleur		jumlah mebeleur yang terpenuhi	3 jenis	100.000.000	Pengadaan mebeleur		jumlah mebeleur yang terpenuhi	3 jenis	100.000.000
Pengadaan komputer dan perlengkapannya		jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	3 jenis	100.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya		jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	3 jenis	100.000.000
Pengadaan alat- alat elektronik		jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	4 jenis	50.000.000	Pengadaan alat-alat elektronik		jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	4 jenis	50.000.000
Pengadaan lemari besi dan feling cabinet		jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang terpenuhi	6 unit	40.000.000	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet		jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang terpenuhi	6 unit	40.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	3 lokasi	80.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	3 lokasi	80.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara selama 12 bulan	45 Unit	120.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara selama 12 bulan	45 Unit	120.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		jumlah perlengkapan yang dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	10.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		jumlah perlengkapan yang dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	10.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		jumlah prasarana gedung BLK yang terpelihara selama 12 bulan	15 jenis	22.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		jumlah prasarana gedung BLK yang terpelihara selama 12 bulan	15 jenis	22.500.000	
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		jumlah mebeleur yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		jumlah mebeleur yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	5.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya		jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	12 bln	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya		jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	12 bln	20.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik		jumlah alat-alat elektronik yg dipelihara selama 12 bulan	12 bln	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik		jumlah alat-alat elektronik yg dipelihara selama 12 bulan	12 bln	20.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja		jumlah prasarana BLK yang terpelihara selama 12 bulan	4 kejuruan	25.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja		jumlah prasarana BLK yang terpelihara selama 12 bulan	4 kejuruan	25.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feling cabinet		jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling cabinet		jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	5.000.000	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		jumlah gedung yang direhab	3 lokasi	500.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		jumlah gedung yang direhab	3 lokasi	500.000.000	

<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Posentase tingkat kedisiplinan ASN</b>	<b>100%</b>	67.500.000	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Posentase tingkat kedisiplinan ASN</b>	<b>100%</b>	67.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	40 stel	22.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	40 stel	22.500.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan		jumlah pakaian kerja yang tersedia	40 stel	22.500.000	Pengadaan pakaian kerja lapangan		jumlah pakaian kerja yang tersedia	40 stel	22.500.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	40 stel	22.500.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	40 stel	22.500.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN</b>	<b>3.63%</b>	100.000.000	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN</b>	<b>3.63%</b>	100.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan		jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 org	75.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 org	75.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		jumlah bimtek yang diikuti dan pelatihan	15 kali	25.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		jumlah bimtek yang diikuti dan pelatihan	15 kali	25.000.000
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia</b>	<b>60%</b>	124.000.000	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia</b>	<b>60%</b>	124.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	3 lap	65.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	3 lap	65.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 lap	7.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 lap	7.000.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 lap	7.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 lap	7.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		jumlah laporan monev yang tersusun	4 lap	45.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		jumlah laporan monev yang tersusun	4 lap	45.000.000
<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>		<b>Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia</b>	<b>60%</b>	<b>145.000.000</b>	<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>		<b>Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia</b>	<b>60%</b>	<b>145.000.000</b>
Penyusunan data base perencanaan SKPD		tersedianya data perencanaan	1 dok	75000000	Penyusunan data base perencanaan SKPD		tersedianya data perencanaan	1 dok	75000000
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	6 dok	70000000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	6 dok	70000000
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>a. Pencari kerja yang ditempatkan,</b>	<b>a. 57,96%</b>	<b>1.785.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>a. Pencari kerja yang ditempatkan,</b>	<b>a. 57,96%</b>	<b>1.785.000.000</b>
		<b>b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi,</b>	<b>b. 73,68%</b>				<b>b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi,</b>	<b>b. 73,68%</b>	

		<b>c. Jumlah LPK yang terbina dan memiliki ijin</b>	<b>c. 40 LPK</b>			<b>c. Jumlah LPK yang terbina dan memiliki ijin</b>	<b>c. 40 LPK</b>		
		<b>d. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh sosial produktifitas</b>	<b>d. 20 orang</b>			<b>d. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh sosial produktifitas</b>	<b>d. 20 orang</b>		
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK		jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK yang meningkat kemampuannya	38 orang	90.000.000	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK yang meningkat kemampuannya	38 orang	90.000.000	
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja		jumlah bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja yang dapat disediakan	20 buah	25.000.000	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	jumlah bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja yang dapat disediakan	20 buah	25.000.000	
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja		Jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan	360 peserta	1.125.000.000	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan	360 peserta	1.125.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		jumlah laporan monev yang tersusun	4 laporan	40.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan monev yang tersusun	4 laporan	40.000.000	
Pengadaan sarana dan prasarana BLK		jumlah sarana dan prasarana BLK yang terpenuhi	1 paket	200.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	jumlah sarana dan prasarana BLK yang terpenuhi	1 paket	200.000.000	
Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktivitas	38 tenaga/instruktur	120.000.000	Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktivitas	38 tenaga/instruktur	120.000.000	
Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta		jumlah LPKS yang dilakukan pengukuran kinerja	38 LPKS	40.000.000	Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	jumlah LPKS yang dilakukan pengukuran kinerja	38 LPKS	40.000.000	

Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta		jumlah LPKS yang tersusun profilnya	38 LPKS	35.000.000	Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta		jumlah LPKS yang tersusun profilnya	38 LPKS	35.000.000	
Bimbingan program pemagangan ke luar negeri		jumlah peserta peningkatan pelatihan bahasa Jepang dan Kesemaptaan	50 peserta	110.000.000	Bimbingan program pemagangan ke luar negeri		jumlah peserta peningkatan pelatihan bahasa Jepang dan Kesemaptaan	50 peserta	110.000.000	
<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>		<b>a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat</b>	<b>a. 76,47%</b>	<b>3.719.250.000</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>		<b>a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat</b>	<b>a. 76,47%</b>	<b>3.719.250.000</b>	
		<b>b. Persentase jumlah tenaga kerja yang terserap</b>	<b>b. 85%</b>					<b>b. Persentase jumlah tenaga kerja yang terserap</b>		<b>b. 85%</b>
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja		jumlah penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan	12 dokumen	25.000.000	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja		jumlah penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan	12 dokumen	25.000.000	
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja		jumlah lowongan kerja yang tersebarluaskan dan pendampingan ISO 9001:2015 dan Job Fair expo 2018	3 paket	500.000.000	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja		jumlah lowongan kerja yang tersebarluaskan dan pendampingan ISO 9001:2015 dan Job Fair expo 2018	3 paket	500.000.000	
Penyiapan tenaga kerja siap pakai		jumlah siswa kelas XII yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan tes leader	1700 siswa	175.000.000	Penyiapan tenaga kerja siap pakai		jumlah siswa kelas XII yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan tes leader	1700 siswa	175.000.000	



Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		Jumlah lembaga yang diberikan pelatihan kewirausahaan	20 orang	70000000	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		Jumlah lembaga yang diberikan pelatihan kewirausahaan	20 orang	70000000
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat		Terlaksananya jumlah orang yang mendapat bantuan praktek, sarana usaha dan pelatihan	300 org	1.155.000.000	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat		Terlaksananya jumlah orang yang mendapat bantuan praktek, sarana usaha dan pelatihan	300 org	1.155.000.000
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan		Jumlah terlaksananya kegiatan monev	4 Laporan	40.000.000	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan		Jumlah terlaksananya kegiatan monev	4 Laporan	40.000.000
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Tenaga Kerja Daerah		Jumlah penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah yang tersedia	1 dok	400.000.000	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Tenaga Kerja Daerah		Jumlah penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah yang tersedia	1 dok	400.000.000
Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat		Jumlah kesempatan kerja yang tersedia	5040 HOK	750.000.000	Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat		Jumlah kesempatan kerja yang tersedia	5040 HOK	750.000.000
Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus		Jumlah peserta Bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK)	80 org	104.250.000	Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus		Jumlah peserta Bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK)	80 org	104.250.000
Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	0	200000000	Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	0	200000000

Pendataan angkatan kerja	Jumlah dokumen angkatan kerja	2 dok	300.000.000	Pendataan angkatan kerja	Jumlah dokumen angkatan kerja	2 dok	300.000.000
<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>a. Persentase perusahaan yang menerapkan K3</b> <b>b. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan</b> <b>c. Besaran pemeriksaan perusahaan</b> <b>d. Besaran pengujian peralatan di perusahaan</b> <b>e. Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang terfasilitasi</b> <b>f. Rasio UMK terhadap KHL</b>	<b>a. 15 %</b> <b>b. 54 %</b> <b>c. 22 %</b> <b>d. 50 %</b> <b>e. 100 %</b> <b>f. 100 %</b>	<b>945.000.000</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>a. Persentase perusahaan yang menerapkan K3</b> <b>b. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan</b> <b>c. Besaran pemeriksaan perusahaan</b> <b>d. Besaran pengujian peralatan di perusahaan</b> <b>e. Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang terfasilitasi</b> <b>f. Rasio UMK terhadap KHL</b>	<b>a. 15 %</b> <b>b. 54 %</b> <b>c. 22 %</b> <b>d. 50 %</b> <b>e. 100 %</b> <b>f. 100 %</b>	<b>945.000.000</b>
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang dibina	20 lembaga	75.000.000	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang dibina	20 lembaga	75.000.000
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan	6 kasus	40.000.000	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan	6 kasus	40.000.000

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan		jumlah permasalahan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan tenaga kerja AKAD yang mendapat perlindungan hukum	4 kasus	100.000.000	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan		jumlah permasalahan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan tenaga kerja AKAD yang mendapat perlindungan hukum	4 kasus	100.000.000	
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		sosialisasi UMK jamsostek, hubungan industrial dan syarat kerja	80 org	90.000.000	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		sosialisasi UMK jamsostek, hubungan industrial dan syarat kerja	80 org	90.000.000	
Pemberdayaan LKS tripartit		jumlah rapat LKS Tripartit dan deteksi dini perusahaan, sinergitas data ketenagakerjaan dan mayday	6 kali	150.000.000	Pemberdayaan LKS tripartit		jumlah rapat LKS Tripartit dan deteksi dini perusahaan, sinergitas data ketenagakerjaan dan mayday	6 kali	150.000.000	
Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi		jumlah SP/SB yang diverifikasi	15 SP/SB	40000000	Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi		jumlah SP/SB yang diverifikasi	15 SP/SB	40000000	
Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan		jumlah PK/PP/PKB yang tercatat, disahkan dan didaftarkan serta LKS Bipartit yang dibentuk	6 PK/PP/PKB	40000000	Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan		jumlah PK/PP/PKB yang tercatat, disahkan dan didaftarkan serta LKS Bipartit yang dibentuk	6 PK/PP/PKB	40000000	
Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan		jumlah tenaga kerja outsourcing di perusahaan	20 pershn	40000000	Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan		jumlah tenaga kerja outsourcing di perusahaan	20 pershn	40000000	
Pemberdayaan dewan pengupahan		jumlah survey KHL dan rapat dewan	10 kali	370000000	Pemberdayaan dewan pengupahan		jumlah survey KHL dan rapat dewan	10 kali	370000000	

		pengupahan					pengupahan			
	<b>Transmigrasi</b>				<b>675.000.000</b>	<b>Transmigrasi</b>				<b>675.000.000</b>
	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	<b>Jumlah MoU yang disusun bersama dengan wilayah transmigrasi</b>	<b>2 MOU</b>		<b>205.000.000</b>	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	<b>Jumlah MoU yang disusun bersama dengan wilayah transmigrasi</b>	<b>2 MOU</b>		<b>205.000.000</b>
	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	jumlah MOU pertahun	2 MOU		105000000	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	jumlah MOU pertahun	2 MOU		105000000
	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	jumlah transmigran yang dikirim ke lokasi	25 KK		100000000	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	jumlah transmigran yang dikirim ke lokasi	25 KK		100000000
	<b>Program transmigrasi umum</b>	<b>a. Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) b. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi</b>	<b>a. 25 orang b. 25 orang</b>		<b>470.000.000</b>	<b>Program transmigrasi umum</b>	<b>a. Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) b. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi</b>	<b>a. 25 orang b. 25 orang</b>		<b>470.000.000</b>
	Pelatihan transmigrasi regional	jumlah calon transmigran yang terdidik	100 org		100.000.000	Pelatihan transmigrasi regional	jumlah calon transmigran yang terdidik	100 org		100.000.000

Penyiapan data base calon transmigran		jumlah animo calon transmigran yang berminat berangkat transmigrasi	50 KK	50.000.000	Penyiapan data base calon transmigran		jumlah animo calon transmigran yang berminat berangkat transmigrasi	50 KK	50.000.000
Seleksi calon transmigran		jumlah calon transmigrasi yang diseleksi	30 KK	40.000.000	Seleksi calon transmigran		jumlah calon transmigrasi yang diseleksi	30 KK	40.000.000
Pembinaan transmigran pasca penempatan		Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi	2 lokasi	210.000.000	Pembinaan transmigran pasca penempatan		Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi	2 lokasi	210.000.000
Pembinaan Transmigran Pra Penempatan		Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi	2 lokasi	70.000.000	Pembinaan Transmigran Pra Penempatan		Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi	2 lokasi	70.000.000

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG

Drs . MU'MINUN, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680526 199403 1 005

Prakiraan Maju Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
							2019		2020	
							Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah			<b>Pelayanan administrasi Perkantoran</b>  Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	<b>Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan</b>	12 bulan	12 bln	1212000000	12 bln	1240500000
					Jumlah surat terkirim selama 12 bulan		2.500 srt	83000000	2.500 srt	88000000
					Jumlah tagihan telepon, air, dan listrik selama 12 bulan		3 jenis	200000000	3 jenis	200000000
					Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi selama 12 bulan		60 perlt	25000000	60 perlt	25000000

				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin selama 12 bulan	48 unit	20000000	48 unit	20000000
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat	1 lap	30000000	1 lap	30000000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	6 org	85000000	6 org	90000000
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama 12 bulan	5 jenis	15000000	5 jenis	15000000
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi selama 12 bulan	12 bln	50000000	12 bln	50000000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang terpenuhi selama 12	10 spanduk	30000000	10 spanduk	35000000

				bulan					
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi komponen listrik/penerangan kantor yang terpenuhi selama 12 bulan	10 jenis	20000000	10 jenis	20000000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi selama 12 tahun	1 jenis	120000000	1 jenis	130000000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi selama 12 bulan	12 bln	20000000	12 bln	20000000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi selama 12 bulan	2900 eks	15000000	2900 eks	15000000
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi selama 12 bulan	35 tabung	10000000	35 tabung	10000000



				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi selama 12 bulan		3,000 dus	69000000	3,000 dus	72500000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/di-ikuti		70 kali	300000000	70 kali	300000000
				Penyediaan jasa keamanan	Jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi selama 12 bulan		6 org	120000000	6 org	120000000
				<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	<b>12 bulan</b>		<b>2707500000</b>		<b>2899013000</b>
				Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang terbangun		1 unit	1500000000	1 unit	1609013000
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi		2 unit	60000000	3 unit	100000000

			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat terpenuhi	4 jenis	50000000	4 jenis	50000000
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	0 jenis	-	3 jenis	40000000
			Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	3 jenis	100000000	3 jenis	100000000
			Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	3 jenis	100000000	3 jenis	100000000
			Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang terpenuhi	4 jenis	50000000	4 jenis	50000000
			Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet	Jumlah lemari besi dan feling cabinet yang terpenuhi	6 unit	40000000	6 unit	40000000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	3 lokasi	80000000	3 lokasi	80000000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 12 bulan	45 Unit	120000000	45 Unit	120000000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	10000000	12 bulan	10000000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung BLK yang dipelihara selama 12 bulan	15 jenis	22500000	15 jenis	25000000
Pemeliharaan rutin/berkala mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	5000000	12 bln	5000000
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	20000000	12 bln	20000000
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	20000000	12 bln	20000000

				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja	Jumlah prasarana BLK yang dipelihara selama 12 bulan		4 kejuruan	25000000	4 kejuruan	25000000
				Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling kabinet	Jumlah lemari besi dan feling cabinet yang dipelihara selama 12 bulan		12 bln	5000000	12 bln	5000000
				Pemeliharaan rutin/berkala bangunan bersejarah	Jumlah bangunan bersejarah yang dipelihara, direhab selama 12 bulan			-		-
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab		3 lokasi	500000000	3 lokasi	500000000
				<b>Peningkatan disiplin aparatur</b>	Tingkat kedisiplinan ASN	<b>100%</b>	<b>50 stel</b>	<b>67500000</b>	<b>50 stel</b>	<b>75000000</b>
				Kegiatan: Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi		40 stel	22500000	50 stel	25000000
				Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja yang tersedia		40 stel	22500000	50 stel	25000000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia		40 stel	22500000	50 stel	25000000
<b>Peningkatan kapasitas aparatur sumber daya aparatur</b>	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	100%	<b>60</b>	<b>100000000</b>	<b>80</b>	<b>112500000</b>
Kegiatan : Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan		50 org	75000000	50 org	82500000
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti dan pelatihan		15 kali	25000000	15 kali	30000000
<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan</b>	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia		<b>80</b>	<b>124000000</b>	<b>100</b>	<b>145000000</b>
Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah laporan yang tersusun baik dan benar		3 lap	65000000	3 lap	75000000

				ikhtisar realisasi kinerja SKPD						
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu		1 lap	7000000	1 lap	10000000
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu		1 lap	7000000	1 lap	10000000
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang tersusun		4 lap	45000000	4 lap	50000000
				<b>Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	<b>100%</b>	<b>80</b>	<b>145000000</b>	<b>100</b>	<b>75000000</b>
				Kegiatan : Penyusunan Data base Perencanaan SKPD	Tersedianya data perencanaan		1 dok	75000000	0 dok	
				Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan		6 dok	70000000	6 dok	75000000

				SKPD	benar					
Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran  Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Prosentase tingkat pengangguran terbuka  Prosentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja		<b>Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka  Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	<b>69,87</b>	<b>76</b>	<b>1785000000</b>	<b>77</b>	<b>1905000000</b>
				Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan		360 peserta	1125000000	380 peserta	1200000000
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang tersusun		4 lap	40000000	4 lap	75000000
				Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang dibutuhkan		1 paket	200000000	1 paket	200000000
				Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktivitas		38 tenaga/instruktur	120000000	38 tenaga/instruktur	120000000

	Meningkatnya akreditasi dan perijinan lembaga pelatihan kerja	Jumlah LPK milik pemerintah, perusahaan dan milik swasta yang mendapatkan pembinaan		Jumlah LPK yang terbina dan berijin	35	40		40	
			Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK yang meningkat kemampuannya		38 orang	90000000	38 orang	90000000
			Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Jumlah bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja yang dapat disediakan		20 buah	25000000	20 buah	25000000
			Penyusunan Profil Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah LPKS yang tersusun profilnya		38 LPKS	35000000	38 LPKS	35000000
			Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	jumlah LPKS yang dilakukan pengukuran kinerja	41LPKS	38 LPKS	40000000	38 LPKS	40000000
			Bimbingan program	Jumlah peserta peningkatan		50 peserta	110000000	50 peserta	120000000



				pemagangan ke luar negeri	profesionalisme berbahasa jepang dan kesamaptaan					
				<b>Peningkatan kesempatan kerja</b>	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	<b>83,3</b>	<b>82</b>	<b>3719250000</b>	<b>88</b>	<b>3865000000</b>
				Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan		0	200000000	0	295000000
				Pendataan angkatan kerja	Jumlah dokumen angkatan kerja		2 dok	300000000	2 dokumen	325000000
				Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Terlaksananya jumlah orang yang mendapat bantuan praktek, sarana usaha dan pelatihan		300 org	1155000000	320 org	1340000000
				Monitoring, Evaluasi dan	Prosentase jumlah tenaga kerja yang terserap	97,36	85		88	
					Jumlah terlaksananya		4 Laporan	40000000	4 laporan	75000000

pelaporan	kegiatan monev				
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah yang tersedia	0	1 dok	400000000	0 dokumen
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan		12 dokumen	25000000	12 dokumen 25000000
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersebarluaskan dan pendampingan ISO 9001		3 paket	500000000	3 paket 500000000
Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah siswa kelas XII yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan tes leader		1700 siswa	175000000	1800 siswa 180000000
Pengembangan kelembagaan	Jumlah lembaga yang diberikan		20 orang	70000000	40 orang 125000000

			produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	pelatihan kewirausahaan					
			Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat	Jumlah kesempatan kerja yang tersedia		5040 HOK	750000000	5040 HOK	850000000
			Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus	Jumlah peserta Bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK)		80 org	104250000	100 org	150000000
	Meningkatnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	<b>Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b>	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	56,28	<b>695</b>	<b>945000000</b>	<b>750</b>	<b>1015000000</b>
			Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi UMK jamsostek, norma kerja		80 org	90000000	100 org	100000000
				Rasio UMK terhadap KHL	102	100		100	
			Pemberdayaan LKS Tripartit	Jumlah rapat LKS Tripartit dan deteksi dini perusahaan		6 kali	150000000	6 kali	190000000

Pemberdayaan dewan pengupahan	Jumlah survey KHL dan rapat dewan pengupahan		10 kali	370000000	10 kali	375000000
<b>Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b>	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang terfasilitasi	100	100		100	
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang di bina		20 lembaga	75000000	20 lembaga	90000000
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan		6 kasus	40000000	6 kasus	40000000
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah permasalahan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan		4 kasus	100000000	4 kasus	100000000

			Pembinaan dan pemantauan kinerja organisasi	Jumlah SP/SB yang terdaftar dan tercatat	15 SP/SB	40000000	15 SP/SB	40000000
			Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan	Jumlah PP/PKB/LKS Bipartit yang terdaftar dan tercatat	6 PK/PP/PKB	40000000	6 PK/PP/PKB	40000000
			Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Jumlah perusahaan outsourcing yang terdaftar dan tercatat	20 pershn	40000000	20 pershn	40000000
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi	Tercapainya jumlah penempatan transmigrasi (KK)	<b>Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	Jumlah MoU yang disusun bersama dengan wilayah transmigrasi		<b>205000000</b>		<b>210000000</b>
			Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengemabangan kawasan transmigrasi	jumlah MOU pertahun	2 MOU	105000000	2 MOU	110000000
			Pengerahan dan fasilitasi perpindahan	jumlah transmigran yang dikirim ke lokasi	25 KK	100000000	25 KK	100000000

				serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM						
				<b>Transmigrasi Regional</b>	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>470000000</b>	<b>25</b>	<b>475750000</b>
				Pelatihan Transmigrasi Regional	jumlah calon transmigrasi yang terdidik		100 org	100000000	100 org	100000000
					Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	18	25		25	
				Penyiapan database calon transmigran	jumlah animo calon transmigrasi yang berminat berangkat transmigrasi		50 KK	50000000	50 KK	50000000
				Seleksi calon transmigran	jumlah calon transmigrasi yang diseleksi		30 KK	40000000	30 KK	40000000
				Pembinaan	jumlah kesiapan		2 lokasi	210000000	2 lokasi	215750000

				transmigran pascapenempatan	lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi					
				Pembinaan transmigran pra penempatan	jumlah kesiapan lokasi transmigrasi yang terfasilitasi	2 lokasi	70000000	2 lokasi	70000000	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG

Drs . MU'MINUN, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680526 199403 1 005

**Tabel 4**  
**Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018**  
**Kabupaten Pemalang**

Nama SKPD : **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
1	2	3	4	5
Prioritas I				
1.	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Desa Gunungjaya Kec. Belik	Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan	20 orang
		Desa Parunggalih Kec. Bodeh	Jumlah Peserta Pelatihan Bengkel Motor	20 orang
		Desa Sungapan Kec. Pemalang	Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan	20 orang
		Desa Nyamplungsari Kec. Petarukan	Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan	20 orang
2.	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan : Pemberiab Fasilitasi dan mendorong sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Desa Kalisaleh Kec. Belik	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
		Desa Belik Kec. Belik	Jumlah Orang Pelatihan Olahan Nanas	20 orang
		Desa Muncang Kec Bodeh	Jumlah Orang Pelatihan Tata Boga	20 orang
		Desa Petanjungan Kec. Petarukan	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
		Desa Ampelgading Kec. Ampelgading	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
		Desa Pagergunung Kec. Ulujami	Jumlah Orang Pelatihan Tata Boga	20 orang
		Desa Blendung Kec. Ulujami	Jumlah Orang Pelatihan Pembuatan Aneka Kue	20 orang
		Desa Cibuyur Kec. Warungpring	Jumlah Orang Pelatihan dan Fasilitasi Menjahit	20 orang
Prioritas II				



1.	<p>Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</p>	<p>Desa Medayu Kec Watukumpul</p> <p>Desa Jatiroyom Kec Bodeh</p> <p>Desa Gunungbatu Kec Bodeh</p> <p>Desa Kemandungan Kec Bodeh</p> <p>Desa Kesesirejo Kec Bodeh</p> <p>Desa Glandang Kec Bantarbolang</p> <p>Desa Jarakah Kec Taman</p>	<p>Jumlah Peserta Pelatihan Las Listrik</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan (Las)</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan Bengkel Motor</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan/Montir Mobil</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan Las</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan Bengkel Las</p>	<p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p>
2.	<p>Program : Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>Kegiatan : Pemberiab Fasilitasi dan mendorong sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat</p>	<p>Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading</p> <p>Desa Kandang Kec Comal</p> <p>Desa Sikayu Kec Comal</p> <p>Desa Pakembaran Kec Warungpring</p> <p>Desa Cibuyur Kec Warungpring</p> <p>Desa Sima Kec. Moga</p> <p>Desa Gombang Kec. Belik</p> <p>Desa Bongas Kec. Watukumpul</p> <p>Desa Gapura Kec. Watukumpul</p>	<p>Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan Bengkel Las</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan Service Motor</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan dan Fasilitasi Montir Kendaraan Ringan</p> <p>Jumlah Orang Pelatihan Pengemasan Makanan Khas Kec. Moga</p> <p>Jumlah Orang Pelatihan Menjahit</p> <p>Jumlah Orang Pelatihan Menjahit</p> <p>Jumlah Orang Pelatihan Usaha Ekonomi</p>	<p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p> <p>20 orang</p>

	Desa Cikadu Kec Watukumpul	(Pengrajin Kripik) Jumlah Orang Pelatihan Pembuatan Kerupuk	20 orang
	Desa Wisnu Kec Watukumpul	Jumlah Orang Pelatihan Tata Boga	20 orang
	Desa Pasir Kec. Bodeh	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Desa Pabuaran Kec Bantarbolang	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Desa Sambeng Kec Bantarbolang	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Kel Kebondalem Kec Pemalang	Jumlah Orang Pelatihan Tata Boga	20 orang
	Desa Danasari Kec Pemalang	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Desa Lawangrejo Kec Pemalang	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Desa Cibelok Kec Taman	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit Batik	20 orang
	Desa Banjaran Kec Taman	Jumlah Orang Pelatihan Olahahan Tempe	20 orang
	Desa Jebed Utara Kec Taman	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Desa Kendalrejo Kec Petarukan	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Desa Bulu Kec Petarukan	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Desa Jatirejo Kec Ampelgading	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Desa Kebojongan Kec Comal	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang
	Desa Samong Kec Ulujami	Jumlah Orang Pelatihan Menjahit	20 orang

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG

Drs . MU'MINUN, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680526 199403 1 005